

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERAN SERTA LINGKUNGAN  
PENDIDIKAN TINGGI BERWAWASAN ANTI NARKOBA DI KOTA  
SEMARANG**

**Hilda Marta Suri, Kismartini  
14020113140127**

---

**ABSTRAK**

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan suatu masalah multidimensi dan multisektoral, semua lini kehidupan bisa saja terkena bahaya narkoba. Tidak terlepas dari hal tersebut mahasiswa atau masyarakat usia muda merupakan target utama penyalahgunaan narkoba, mengingat tingkat emosi yang belum stabil sehingga mudah terpengaruh untuk menyalahgunakan narkoba. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional untuk menanggulangi permasalahan narkoba yang menjadi masalah di Indonesia, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta penanganan permasalahan narkoba pemerintah mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat baik dari lingkungan kampus dan lingkungan kerja. Berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014 dibentuklah wadah Peran Serta Masyarakat untuk melaksanakan kebijakan terhadap peran serta Lingkungan Pendidikan Tinggi. Teknik analisis untuk memperoleh data melalui hasil wawancara dengan informan, observasi, dan dokumen pendukung. Penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle yang berpendapat bahwa faktor pendorong implementasi memiliki tiga faktor utama yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, kemudian hasil implementasi dapat dilihat dari dampak dan perubahan pada masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peran serta Lingkungan Pendidikan Tinggi Berwawasan Anti Narkoba cukup berhasil dalam menurunkan angka penyalahgunaan di Kota Semarang, namun masih kurang optimal dengan adanya penurunan performance, dan tingkat pelayanan yang diberikan, mengakibatkan adanya penurunan minat Mahasiswa untuk bergabung kedalam Satuan Tugas anti narkoba. Perubahan yang diinginkan terciptanya Lingkungan Pendidikan Tinggi Berwawasan Anti Narkoba. Rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan performance dan kualitas pelatihan dan penyuluhan, melakukan inovasi agar dapat memberikan sarana dan prasarana yang sesuai dengan harapan masyarakat.

**Kata Kunci: Implementasi, Strategi, Derajat Perubahan, Jenis Manfaat, Kepentingan Aktor**

# **THE IMPLEMENTATION OF POLICIES ON THE ROLE OF THE HIGHER EDUCAION ENVIRONMENT OF ANTI-NARCOTICS IN SEMARANG CITY**

**Hilda Marta Suri, Kismartini**  
**14020113140127**

---

## ***ABSTRACT***

Circulation and drug abuse in Indonesia is a multidimensional and multisectoral problem, all lines of life can be exposed to the dangers of drugs. Not apart from that students or young people are the main target of drug abuse, given the level of emotions that have not been stable so easily affected to abuse drugs. Based on Act No 35 of 2009, the Government established the National Narcotics Agency to tackle the drug problem that became a problem in Indonesia, BNN was given the authority of investigation and investigation of narcotics crime and narcotics precursor. In the effort to prevent abuse and illicit drug trafficking as well as handling of government drug problem to include all components of society both from campus environment and work environment. Based on the Regulatory Chief of BNN No 16 of 2014, a Community Participation Container was established to implement the policy towards the participation of the Higher Education Environment. Technical analysis to obtain data through interview with informant, observation, and supporting document. This research uses Merilee S. Grindle theory which argues that the driving factors of implementation have three main factors, namely policy content and policy environment, then the implementation result can be seen from the impact and change on society. The results of this study indicate that the Implementation of the Policy of the Role of the Environment of Higher Education with Anti-Drugs is quite successful in reducing the number of abuse in Semarang City, but still less than optimal with the decrease of performance, and the level of service provided, resulting in the decreasing interest of the Students to join the Unit Anti-drug duties. The desired changes to the creation of an Anti-Narcotics Based Higher Education Environment. The recommendations are to improve the performance and quality of training and counseling, innovation in order to provide facilities and infrastructure that are in line with community expectations.

**Keywords: Implementation, Strategy, Degree of change, Benefits, Interests of the Actor**

## 1. PENDAHULUAN

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

“Indonesia Negeri Bebas Narkoba 2016” merupakan sebuah wacana yang menjadi visi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan berdasarkan jurnal data pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

(P4GN) tahun 2015 edisi tahun 2016, selama kurun waktu tahun 2009 sampai tahun 2011 pengguna narkoba naik sebanyak 2,8% atau 5,1 juta jiwa pada kelompok usia 10-59 tahun.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota.

Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta penanganan permasalahan narkoba tidak mungkin dapat dilakukan oleh pihak pemerintah saja, melainkan perlu adanya partisipasi dan keseriusan serta komitmen seluruh komponen masyarakat baik dari lingkungan kampus dan lingkungan kerja yang peduli terhadap masalah

narkoba karena dengan adanya peran aktif dan komitmen yang tinggi tersebut, diharapkan akan tercipta ketahanan terhadap berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh narkoba. Tujuan semua sektor dalam masyarakat yang bergerak dalam penanggulangan narkoba dan membantu generasi muda bebas dari narkoba. Pengalaman menunjukkan bahwa sumber tenaga yang paling besar dan kuat dalam penanggulangan Narkoba adalah jaringan orang-orang yang saling mendukung, saling bertukar informasi dan saling Berkerja. Sehingga diciptakan kegiatan-kegiatan sebagai Pembentukan wadah Peran Serta Masyarakat diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014.

Dalam rangka melakukan upaya untuk menekan dan mengurangi permasalahan narkoba, keikutsertaan masyarakat dalam setiap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah hal yang sangat diharapkan. Terutama di lingkungan mahasiswa yang kebanyakan

mahasiswa selalu memiliki teman banyak dari berbagai kalangan yang hidupnya selalu bergerombol, maka tidak jarang mahasiswa yang memakai narkoba karena pengaruh teman dalam salah memilih teman atau pengaruh lingkungan sekitar kampus maupun lingkungan rumah. Dengan adanya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ini maka setiap tindakan-tindakan dan perubahan akan lebih terjadi apabila masyarakat saling bekerja.

## **2. METODE PENELITIAN DAN TEORI**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami,

memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi dan manajemen.<sup>1</sup>

## 2.2 Teori

### 2.2.1 Teori Administrasi Publik

Menurut **Leonard D. White**, Administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik ukuran besar maupun kecil.<sup>2</sup> **Herbert A. Simon**, mendefinisikan Administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.<sup>3</sup> Menurut **Harbani Pasolong**, Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai

tujuan atas dasar efektif, efisiensi dan rasional.<sup>4</sup>

Dari ulasan kedua tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Harbani Pasolong mendefinisikan Administrasi Publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif<sup>5</sup>. Sedangkan menurut Felix A. Nigro dan Llyod G. Nigro dalam buku dalam buku Ilmu Administrasi Publik mendefinisikan Administrasi Publik sebagai berikut :

1. Adminsitration Publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.

---

<sup>1</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung, Alfabeta. Hlm. 3.

<sup>2</sup> Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>3</sup> Pasolong, Harbani, 2010, *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta. Hlm. 2.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

2. Administrasi publik meliputi tiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.
3. Administrasi Publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut J. Gordon dalam buku Ilmu Administrasi Publik Administrasi Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan badan legislatif, yudikatif dan eksekutif.<sup>7</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik adalah sebuah pekerjaan atau sebuah proses yang dilakukan sekelompok orang dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan guna untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Pada dasarnya perkembangan suatu ilmu dapat ditelusuri melalui perubahan paradigmanya. Menurut Inu Kencana Syafii

Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang.<sup>8</sup> Dalam perkembangan bidang ilmu administrasi publik tumbuh dan dikenal sejumlah paradigma yang menggambarkan adanya perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan dalam tujuan, teori dan metodologi atau dalam bangunan epistemologi serta nilai-nilai yang mendasari.<sup>9</sup> Nicolas Henry (1988: 33-54) dalam buku Teori Administrasi Publik, mengemukakan lima paradigma administrasi public, yaitu :<sup>10</sup>

- Paradigma Pertama : Dikotomi antara Politik dan Administrasi (1900-1926)

Fokus ilmu administrasi Negara terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan. Sedangkan masalah-masalah pemerintahan, politik dan kebijaksanaan merupakan substansi ilmu politik. Lokus paradigma ini adalah permasalahan di

---

<sup>6</sup> Syafii, *op. cit.* Hlm. 25

<sup>7</sup> Syafii, *loc. Cit.*

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>9</sup> Pasolong, *op.cit.* Hlm. 28.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm. 28-30.

mana seharusnya administrasi Negara ini berada. Pada masa ini, dibedakan dengan jelas antara administrasi dengan politik Negara. Tonggak sejarah sebagai momentum dari fase ini adalah tulisan dari Frank J. Goodnow dan Leonald D. White. Di dalam bukunya *Politics and Administration*, ia berpendapat bahwa ada dua fungsi pokok pemerintahan yang amat berbeda satu sama lain. Dua fungsi pokok yang dimaksud adalah politik dan administrasi. Menurut Goodnow dan pengikutnya, administrasi Negara seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan.

- Paradigma Kedua : Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Lokus dari administrasi Negara tidak merupakan masalah dalam paradigma ini, yang dipentingkan fokusnya yaitu : “prinsip-prinsip administrasi” dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Pada masa ini (1927-1937),

administrasi memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Prinsipnya adalah administrasi Negara dapat diterapkan di Negara mana saja walaupun berbeda kebudayaan, lingkungan visi dan lainnya. Pada fase ini, administrasi Negara mencapai puncak reputasinya. Menurut Gulick dan Urwick, prinsip adalah sangat penting bagi administrasi sebagai suatu ilmu. Adapun letak di mana prinsip itu akan dipakai tidak begitu penting. Fokus memegang peranan penting dibandingkan lokus. Prinsip administrasi yang terkenal dari Gulick dan Urwick adalah POSDCORB (*Planning, Organization, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*).

- Paradigma Ketiga : Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Pada masa ini, secara singkat dijelaskan bahwa fase paradigma ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi Negara dan ilmu politik.

Konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungannya dengan focus keahliannya yang esensial. Umar (2004: 5) menyebut bahwa pada fase ini administrasi Negara telah berkembang sebagai bagian dari ilmu politik. Dalam masa ini, ada dua perkembangan baru yang patut dicatat, yaitu: (1) Tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai suatu sarana yang bersifat epistemologis, (2) Timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai salah satu bagian dari ilmu administrasi. Selanjutnya, dalam fase ini, Dwight Waldo memprotes perlakuan ilmu politik terhadap ilmu administrasi yang menyebut administrasi bukan lagi dianggap sebagai ilmu politik berdasarkan Laporan Komisi Ilmu Politik sebagai suatu disiplin dari APSA (*American Political Science Association*), (1962), dengan menulis bahwa sarjana-sarjana ilmu politik tidak lagi mengidentifikasikan dirinya dengan administrasi Negara adalah bersikap tidak

memperdulikan dan memusuhi. Selanjutnya sarjana administrasi Negara merasa tidak senang dan dianggap sebagai warga kelas dua.

- Paradigma Keempat : Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970)

Pada masa ini, administrasi Negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi. Perkembangan ini diawali dengan ketidaksenangan bahwa ilmu administrasi dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu politik. Sebagai suatu paradigma, pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan focus, tetapi tidak pada lokusnya. Usaha pengembangan, terutama diperoleh dari pengaruh fakultas administrasi perusahaan (*school of business administration*) mempercepat proses mencari alternatif paradigma ilmu administrasi. Pada tahun 1956 terbitlah jurnal *Administrative Science Quarterly*, sebagai sarana yang amat penting untuk menyuarakan pendapat dan konsepsi-konsepsi dari paradigma ini.

- Paradigma Kelima : Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara ( 1970)

Pada masa ini, administrasi Negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi Negara, yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan, dan ekonomi politik. Dalam waktu singkat, administrasi Negara sebagai suatu bidang kajian telah menunjukkan warnanya sendiri. Beberapa departemen, fakultas dan akademi baru administrasi Negara dan *public affairs* bermuculan. Salah satu *trend* dari pertumbuhan administrasi Negara ini adalah terbentuknya asosiasi nasional dari fakultas-fakultas tersebut. Pada tahun 1980 asosiasi ini telah mempunyai anggota lebih dari 200 institusi, dan lebih dari 25.000 mahasiswa baik yang penuh ataupun yang *parttime* terdaftar dalam program MPA (*Master of Public Administration*) pada akhir tahun 1970.

Dalam penelitian ini, peneliti memakai paradigma kelima yaitu administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara karena

dalam penelitian ini sudah adaya kejelasan tentang focus dan locus yang menjadi penelitian tersebut.

### 2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan

Berikut merupakan beberapa model pendekatan Implementasi Kebijakan Publik, yaitu:

- Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

#### 1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka

kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

## 2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

## 3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat

kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

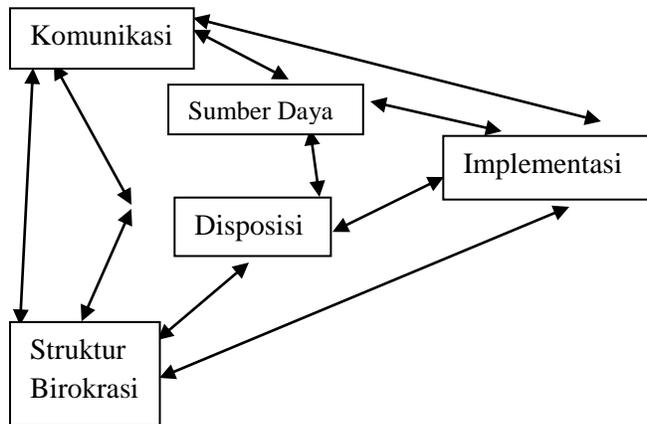
## 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures* atau *SOP*). *SOP* menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

**Gambar 1.3**

Sumber: Grindle, merilee S dalam Subarsono

**Model Implementasi menurut Edward III (2005:94)**

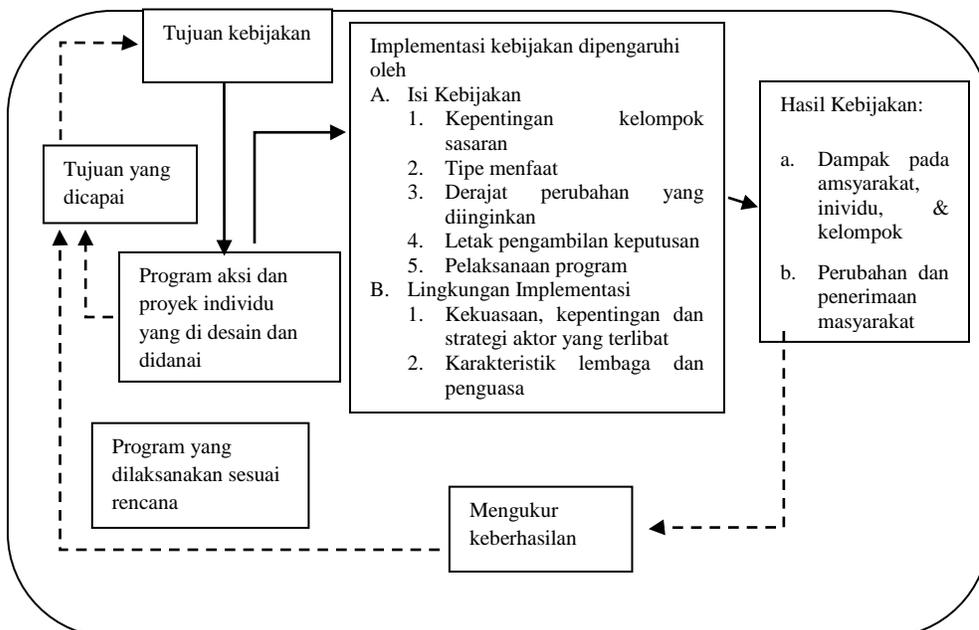


Sumber: Edwards III dalam Subarsono (2005:91)

- Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

**Gambar 1.5**

**Model Implementasi Menurut Grindle**



Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan; (2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai, sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi

kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model dari Teori Merilee S. Grindle (1980) sebagai acuan dalam membahas permasalahan yang terjadi dalam kebijakan Peran Serta Lingkungan Pendidikan Tinggi Berwawasan Anti Narkoba di Kota Semarang. Dalam model Teori Merilee S. Grindle (1980) terdapat enam variabel isi kebijakan dan tiga variabel lingkungan kebijakan yang saling berhubungan dalam proses implementasi kebijakan publik. Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan; (2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program

sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai, sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dalam kebijakan Peran Serta Lingkungan Pendidikan Tinggi Berwawasan Anti Narkoba yang dimaksud dengan komunikasi adalah cara Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan kegiatan kepada pelajar/mahasiswa dan civitas akademika yang ada di Kota Semarang mengenai tujuan dari pelaksanaan program ini. Tujuan dari program kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan

Masyarakat ini harus jelas dan dapat dipahami oleh pelajar/ mahasiswa dan civitas akademika agar tidak terjadi kesalahpahaman.

### **3. HASIL PENELITIAN**

Tahap implementasi merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan kebijakan. Dimana Tahap ini untuk mengetahui tentang bagaimana proses pelaksanaan dari kebijakan yang ada dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan mencapai keberhasilan atau sebaliknya. Suatu kebijakan dianggap baik apabila manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk melihat dan mengamati bagaimana implementasi kebijakan peran serta lingkungan pendidikan tinggi berwawasan anti narkoba yang merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional untuk memberantas dan menekan angka Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di lingkungan pendidikan tinggi,

bagaimana regulasi tersebut di jalankan dan apa saja faktor penghambat dan pendorong implementasi kebijakan peran serta lingkungan pendidikan tinggi berwawasan anti narkoba di Kota Semarang.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk menangani permasalahan Narkoba yang ada di Indonesia maka Pemerintah membuat Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang berwenang menangani semua permasalahan narkoba. Berdasarkan Undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Gunanya untuk memudahkan koordinasi untuk menangani permasalahan narkoba disetiap Provinsi, kabupaten dan kota.

Permasalahan Narkoba di Indonesia sudah menjadi masalah yang sangat kompleks, peredaran narkoba sendiri sudah menyebar ke

semua lini sehingga sangat sulit untuk benar-benar membuat Indonesia bersih dari Narkoba di perlukan upaya yang sangat besar dan partisipasi dari masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan Badan Narkotika Nasional dan memonitoring segala aktivitas yang berhubungan dengan Narkoba di Lingkup kegiatan masyarakat seperti melihat adanya transaksi Narkoba atau penyalahgunaan Narkoba. Pada saat ini Narkoba sudah mulai merusak anak-anak kalangan muda Indonesia dimana hal ini didukung dengan pergaulan pada zaman sekarang yang cenderung sangat bebas mempermudah narkoba untuk masuk kedalam pergaulan remaja saat ini. Maka dari itu Badan Narkotika Nasional membuat kebijakan Peran Serta Lingkungan Pendidikan Tinggi dimana kebijakan ini di khususkan untuk pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan Pengedar Narkoba di Lingkungan Perguruan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Kepala (PERKA) Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014.

Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang jumlah pengungkapan kasus narkoba nomor 7 dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia, hal ini tentu meresahkan mengingat Kalangan muda pastilah menjadi sasaran empuk dari pengedar. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan membuat Kebijakan Peran Serta Lingkungan Pendidikan ini untuk membangun partisipasi Perguruan Tinggi untuk turut serta membantu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di kalangan anak muda dengan cara kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang Peran Serta Lingkungan Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan Lingkungan Pendidikan Tinggi yang berwawasan Anti Narkoba dengan harapan kegiatan ini dapat menekan angka pengguna Narkoba di kalangan anak muda di Kota Semarang. Dilihat dari kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, pelaksanaan,

dampak, derajat perubahan yang diinginkan, dan jenis manfaat yang dihasilkan sudah dapat dikatakan cukup berhasil, hanya saja ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi.

Setelah diadakan wawancara kepada beberapa Informan, beberapa informan mengatakan cukup puas dengan adanya kegiatan Peran Serta Lingkungan Pendidikan ini, hanya saja banyak dari mereka yang memberikan saran jika pihak BNN Provinsi Jawa Tengah, harus lebih meningkatkan inovasi kegiatan agar kegiatan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Tengah bisa lebih terdengar oleh banyak orang sehingga dapat meningkatkan partisipasi Civitas Akademika dan lebih merangkul lagi mahasiswa terutama mahasiswa yang tergabung di dalam satgas/ kader anti narkoba. Harapannya dengan kegiatan ini dapat membantu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menekan angka Penyalahgunaan Narkoba dan peredaran Narkoba di lingkungan Pendidikan Tinggi dan dengan adanya kegiatan ini semakin banyak

mahasiswa yang sadar serta lebih peduli terhadap permasalahan Narkoba di Kota Semarang.

#### **4. KESIMPULAN**

Keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang menjadi pendorong keberhasilan Implementasi Kebijakan Peran Serta Lingkungan Pendidikan Tinggi Berwawasan Anti Narkoba di Kota Semarang, yaitu:

- 1) Kegiatan Peran Serta Lingkungan Pendidikan dampak positif bagi Civitas Akademika dan para mahasiswa, sehingga banyak Perguruan Tinggi yang menyambut baik dan ikut berpartisipasi
- 2) Adanya Pembentukan Satgas dan Penggiat Anti Narkoba sangat menolong Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Civitas Akademika
- 3) Partisipasi yang sangat Tinggi dari Perguruan Tinggi ditambah dengan Target dari kebijakan tersebut adalah Kampus

Bebas Narkoba yang sudah di dapat oleh Udinus sehingga mempengaruhi Perguruan Tinggi lain juga ikut berusaha mendapatkannya.

Tidak berhasilnya dalam Implementasi Kebijakan tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang menjadi penghambat dari Kebijakan Peran Serta Lingkungan Pendidikan Tinggi Berwawasan Anti Narkoba di Kota Semarang, yaitu :

- 1) Keterbatasan dana dan Sumber Daya Manusia yang kurang sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan Peran Serta Lingkungan diberbagai Perguruan Tinggi
- 2) kurang aktifnya satgas/ UKM, hal ini dikarenakan kurangnya kaderisasi dari anggota senior ke anggotanya yang junior dan kesibukkan mahasiswa didalam kuliahnya membuat mahasiswa kurang bisa memanajemen waktunya.

## DAFTAR PUSTAKA

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung

Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta, Bandung

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta, Jakarta